

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Kesejahteraan Rakyat

Vol. 02, Ed. 03, Maret 2022

**Target & Capaian Prioritas
Nasional Kementerian Sosial**

Hal. 1

**Meninjau Pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 Dosis
Lengkap di Indonesia**

Hal. 3

**Menilik Bantuan Fasilitas
Bidang Kebudayaan (FBK)**

Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KE AHLIAN SETJEN DPR RI
Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function



Daftar Isi

Target & Capaian Prioritas Nasional Kementerian Sosial	1
Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Indonesia.....	3
Menilik Bantuan Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK)	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi VIII

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Target & Capaian Prioritas Nasional Kementerian Sosial

HIGHLIGHTS

- Anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78,26 triliun digunakan untuk prioritas nasional sebesar Rp76,96 triliun dan Rp1,296 untuk non prioritas nasional.
- Target prioritas nasional Kemensos tahun 2022 yaitu: bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta KPM; bantuan pangan melalui program Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta KPM; tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir mencakup 219.900.000 orang; pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 364 kabupaten/kota; dan pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 728 desa/kelurahan, dll.
- Capaian output prioritas nasional Kemensos tahun 2022 harus lebih memperhatikan sasaran program dan indikator kinerja program prioritas nasional tahun 2022 agar capaian output prioritas lebih tepat sasaran.

Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 sebesar Rp78,26 triliun yang mengalami penurunan 27,69 persen dibanding tahun 2021 sebesar Rp108,8 triliun. Anggaran Kemensos tahun 2022 digunakan untuk prioritas nasional sebesar Rp76,96 triliun dan Rp1,296 triliun untuk non prioritas nasional. Anggaran prioritas nasional Kemensos berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 digunakan untuk kegiatan prioritas dan strategis terkait dengan 4 Prioritas yaitu PN 3, PN 5, PN 6, dan PN 7.

Target prioritas nasional tahun 2022 yang terkait dengan proyek prioritas strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh yaitu: bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM; Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui program Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta KPM; tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir mencakup 219.900.000 orang; dll. Target prioritas nasional tersebut menjadi tugas Unit Kerja Eselon (UKE) diantaranya Sekretariat Jenderal (Setjen), Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM), dan Badan Diklat Pensos (OTK Perpres 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial). Namun, pada tahun 2022, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemensos berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial guna efisiensi tugas dan penyederhanaan yaitu penghapusan Ditjen PFM dan Badiklitpensos. Tugas Ditjen PFM yang mengelola target prioritas nasional BPNT menjadi tugas Ditjen (Linjamsos).

Berdasarkan capaian dan target output prioritas nasional tahun 2021 bila dibandingkan dengan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 masih ada yang belum tercapai diantaranya tersedianya data kesejahteraan sosial yang mutakhir masih 28,94 persen dan capaian realisasi anggaran BPNT yang penyalurannya sebesar 98,71 persen. Permasalahan data kesejahteraan sosial yang mutakhir sedang diperbaiki Kemensos sejak 1 April 2021 melalui Kepmensos Nomor 12/HUK/2021 menjadi "New DTKS" yaitu perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri
Wulandari

Penulis

Martha Carolina

Sosial (DTKS) dengan memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemensos juga telah mengembangkan aplikasi cekbansos.kemensos.go.id dengan menu baru usul sanggah sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan bantuan sosial. Di sisi lain, capaian realisasi anggaran BPNT yang belum 100 persen disebabkan alamat keluarga penerima manfaat (KPM) tidak ditemukan atau pindah, rekening terblokir, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima BPNT.

Capaian output prioritas nasional Kemensos tahun 2022 agar lebih tepat sasaran harus memperhatikan sasaran program dan indikator kinerja program prioritas nasional berdasarkan Renstra 2020-2024. Sebagai contoh, output prioritas nasional PKH sarannya adalah meningkatnya kemandirian keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya melalui penguatan komplementaritas PKH dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi lainnya. Salah satu indikator kinerja sasaran tersebut adalah 10 persen keluarga PKH graduasi setiap tahun. Sesuai dengan indikator keberhasilan ini, semua pendamping PKH diwajibkan untuk menggraduasi 10 persen KPM mereka setiap tahun sebagai bagian dari indikator kinerja utama mereka. Graduasi diartikan sebagai akhir dari kepesertaan program, yang dapat terjadi ketika sebuah keluarga tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan/kepesertaan demografis atau ketika sebuah keluarga memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil survey Ekki Syamsulhakim & Nurzanty Khadijah(2020)¹ indikator kinerja PKH yaitu praktik graduasi belum optimal disebabkan oleh pendamping PKH belum mendapatkan pelatihan graduasi yang layak terutama karena belum adanya pedoman teknis tata cara graduasi PKH hingga akhir tahun 2020, PKH tidak menetapkan jangka waktu maksimal bagi KPM untuk tetap terdaftar dalam program sehingga graduasi ditentukan oleh pemenuhan kriteria kelayakan PKH oleh KPM, dan pemutakhiran data sosial ekonomi yang seharusnya dilakukan setiap tahun oleh pendamping PKH sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data PKH (2019) belum terwujud. Oleh karena itu, keberhasilan output prioritas PKH agar lebih tepat sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja proses graduasi. Proses graduasi seharusnya terstandardisasi sehingga rentan ditentang oleh KPM dan pemangku kepentingan lainnya, dan juga rentan terhadap kesalahan.

Capaian dan Target Output Prioritas Nasional Kemensos

No	Capaian dan Target Output Prioritas	Tahun 2021				Tahun 2022		Nama Prioritas RKP 2022	
		Unit Kerja	Target	Realisasi	Persentase	Anggaran (triliun Rp)	Target		Anggaran (triliun Rp)
1	Tersedianya data Kesejahteraan sosial yang mutakhir (orang)	Sekretariat Jenderal	163,4juta RT	47,3juta RT	0,289		219,9 juta RT		Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2	Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu/SLRT (Kab/Kota)	Ditjen Pemberdayaan Sosial	300 Kab/kota	300 Kab/kota	1,000	0,10	364 Kab/Kota	0,10	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
3	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil		2.500 keluarga	2.472 keluarga	0,988	179,50	3.500 keluarga	240,68	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4	Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial/Puskesmas		600 Desa/Kel	600 Des/Kel	1,000	0,02	728	0,02	
5	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan asistensi & rehabilitasi (orang)	Ditjen Rehabilitasi Sosial	48.000 orang	74.880 orang	1,560	788,56	59.260 Orang	1182,84	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
6	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi sosial		30.000 anak	46.199 anak	1,540	26,46	35.610 anak	39,70	
7	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial		35.000 orang	48.196 orang	1,377	224,69	36.000 orang	333,70	
8	Korban bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan dasar	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	483.000 orang	535.880 orang	1,110	495,69	483.000 orang	496,67	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
9	Bansos Tunai Bersyarat/PKH (KPM)		10 juta KPM	10 juta KPM	1,000	28,31	10 juta KPM	28,31	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
10	Bantuan Pangan Non Tunai (KPM)	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	18,8 juta KPM	18,55 juta KPM	0,987	47,91	18,8 juta KPM	42,37	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Sumber: Kemensos (diolah)

¹ "Syamsulhakim, Ekki; Khadijah, Nurzanty. 2021. Graduasi dari Program Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia: Hasil dari survei rumah tangga graduasi sejahtera mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020. © World Bank."

Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Indonesia

HIGHLIGHTS

- Pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 208.265.720 jiwa sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap pada tahun 2021. Namun sampai saat ini target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah belum tercapai.
- Vaksinasi dosis lengkap baru mencapai 69,39 persen atau sebesar 144.506.997 jiwa dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 208,265.720 jiwa. Jika dilihat berdasarkan provinsi, tingkat vaksinasi terendah secara berturut turut adalah Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Barat.
- Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya 96.219.176 dosis vaksin. Namun, ketersediaan vaksin sampai saat ini baru mencapai 49.920.402 dosis atau 51,9 persen dari kebutuhan nasional.
- Dari 34 provinsi di Indonesia, baru sekitar 8,82 persen atau 3 provinsi yang sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, salah satunya adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Adapun tujuan program vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi transmisi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) di masyarakat dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19, pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 208.265.720 jiwa telah mendapatkan vaksin dosis lengkap (pertama dan kedua) pada akhir tahun 2021. Namun sejak diberlakukannya program vaksinasi per 13 Januari 2021, target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah belum tercapai hingga saat ini. Ketidaktercapaian tersebut dapat terlihat dari persentase vaksinasi dosis lengkap yang masih berada di bawah target. Vaksinasi dosis lengkap baru mencapai 69,39 persen atau sebesar 144.506.997 jiwa dari target sebesar 208.265.720 jiwa. Jika dilihat berdasarkan provinsi, maka tingkat vaksinasi tertinggi secara berturut-turut adalah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Sedangkan tingkat vaksinasi terendah secara berturut turut adalah Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Barat (Tabel 1). (dicek keterjangkitan di provinsi terendah).

Di sisi lain, program vaksinasi juga harus didukung dengan tersedianya vaksin sesuai dengan kebutuhan nasional. Berdasarkan data vaksin.kemkes.go.id per 2 Maret 2022, diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan pemerintah, jumlah masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 8,22 persen atau 17.129.367 jiwa, sedangkan yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 29,75 persen atau 61.960.442 jiwa. Dengan hitungan sederhana, kita dapat memperkirakan berapa dosis vaksin yang dibutuhkan dengan asumsi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin pertama memerlukan dua dosis,

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri
Wulandari

Penulis

Marihot Nasution · Taufiq Hidayatullah

Tabel 1. Lima Provinsi dengan Capaian Vaksinasi Dosis Lengkap Tertinggi dan Terendah per 2 Maret 2022 (dalam jiwa)

Lima Prov. dengan Capaian Vaksinasi Tertinggi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Lima Prov. dengan Capaian Vaksinasi Terendah	Target	Realisasi	Capaian (%)
DKI Jakarta	8.341.427	10.435.223	125,10	Papua	2.523.771	596.175	23,62
Bali	3.345.130	3.546.208	106,01	Maluku	1.417.690	562.477	39,68
Yogyakarta	2.879.699	2.921.600	101,46	Papua Barat	797.411	316.333	39,67
Kepulauan Riau	1.581.035	1.436.440	90,85	Maluku Utara	954.092	421.696	44,20
Kalimantan Timur	2.874.401	2.257.980	78,55	Sulawesi Barat	1.089.240	505.918	46,45

Sumber: vaksin.kemkes.go.id

sedangkan masyarakat yang telah mendapatkan vaksin pertama memerlukan satu dosis. Dengan perhitungan tersebut, maka pemerintah perlu menyediakan sekurang-kurangnya 96.219.176 dosis vaksin. Namun, ketersediaan vaksin sampai 2 Maret 2022 baru mencapai 49.920.402 dosis atau 51,9 persen dari kebutuhan nasional.

Tabel 2. Kondisi Ketersediaan Vaksin dan Rata-Rata Pelaksanaan Vaksinasi Kepada Masyarakat (dalam dosis)

Lima Prov. dengan Capaian Vaksinasi Terendah	Kebutuhan Vaksin	Vaksin Diterima	Rata-rata Vaksinasi Minggu ke-4 Feb. 2022
Papua	5.047.542	1.845.768	1.619
Maluku	2.835.380	1.978.264	6.105
Papua Barat	1.594.822	1.029.266	1.878
Maluku Utara	1.908.184	1.668.674	1.877
Sulawesi Barat	2.178.480	1.590.216	4.229

Sumber: vaksin.kemkes.go.id (diolah)

rendahnya capaian vaksinasi juga disebabkan karena lambatnya penyaluran vaksinasi kepada masyarakat (Tabel 2), padahal rata-rata pemberian vaksin pada minggu ke-4 Februari sebesar 27.070 dosis per provinsi, sedangkan kelima provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata per provinsi secara nasional.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa target vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah masih belum tercapai dan belum merata secara nasional. Hal ini didasarkan atas capaian vaksinasi nasional yang berada di bawah target serta masih rendahnya provinsi yang telah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Dari 34 provinsi di Indonesia, baru sekitar 8,82 persen atau 3 provinsi yang sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap. Selain itu, pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah terkait pemenuhan kebutuhan vaksin dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, khususnya di provinsi yang rata-rata pelaksanaan vaksinasinya rendah. Di sisi lain, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia, juga menyebutkan memang terdapat beberapa kendala terkait belum rampungnya pemberian vaksinasi, yaitu masih terdapat masyarakat yang belum mau divaksin dan letak geografis daerah terpencil yang sulit diakses.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19 patut diapresiasi, namun penulis berpandangan bahwa pemerintah masih perlu melakukan beberapa hal agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat lebih optimal. **Pertama**, pemerintah perlu meningkatkan persediaan vaksin untuk menjangkau seluruh kebutuhan nasional, baik vaksin yang diproduksi dalam negeri maupun vaksin dari luar negeri. Hal ini perlu segera dilakukan karena kondisi global sedang dalam kondisi tidak stabil sehingga dikhawatirkan ketersediaan vaksin global menjadi sulit didapat. **Kedua**, pemerintah perlu menyalurkan vaksin ke seluruh provinsi di Indonesia sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pada akhirnya seluruh provinsi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. **Ketiga**, pemerintah perlu mempercepat proses vaksinasi di seluruh Indonesia, khususnya untuk provinsi yang rata-rata pelaksanaan vaksinasinya rendah. **Keempat**, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya vaksinasi, karena sampai dengan saat ini masih ada masyarakat yang belum mau divaksin.

Komisi X

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Menilik Bantuan Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK)

HIGHLIGHTS

- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia merupakan rumah dari 1.340 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta kekayaan warisan budaya.
- Agenda pemajuan kebudayaan salah satunya diwujudkan dengan memberikan bantuan FBK kepada para pelaku budaya.
- FBK adalah kegiatan pendukung berupa fasilitas dana hibah yang diberikan kepada kelompok ataupun perseorangan untuk mendorong pemajuan kebudayaan.
- Pada tahun 2022, bantuan FBK diprioritaskan kepada pelaku budaya yang berada di wilayah 3T, penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok lansia serta pelaku budaya yang berada pada provinsi dengan IPK di bawah rata-rata nasional tahun 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia merupakan rumah dari 1.340 suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta kekayaan warisan budaya, baik benda maupun tak benda yang jumlahnya mencapai ribuan sehingga menghasilkan struktur budaya dengan tingkat kemajemukan tinggi (Statistik Sosial Budaya, 2018). Kemajemukan budaya yang tinggi dapat menjadi salah satu investasi Indonesia dalam membangun peradaban bangsa kedepannya.

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tertera pada Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yaitu “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Maka, sebagai wujud nyata mengamanatkan pasal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU tersebut merupakan acuan *legal formal* pertama Indonesia untuk mengelola kekayaan budaya.

Terdapat 7 (tujuh) agenda strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan yaitu : 1) menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 2) melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional; 3) mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional; 4) memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5) memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; 6) reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan 7) meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya, sebagai upaya mewujudkan agenda strategis pemajuan kebudayaan maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud memberikan Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK) sejak tahun 2020. FBK adalah kegiatan pendukung berupa fasilitasi dana hibah yang diberikan kepada suatu kelompok kebudayaan atau perseorangan, tidak diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan non-komersial, serta dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait bidang kebudayaan (*stakeholder*) untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan secara langsung dan menyeluruh. Adapun FBK yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pelaku budaya dapat dilihat pada tabel berikut.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur:

Slamet Widodo · Marioshot Nasution · Martha
Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri
Wulandari

Penulis

Savitri Wulandari · Ollani Vabiola Bangun

Fasilitas Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022*
Tema	Merajut Harmoni Kebhinekaan	Ketahanan Budaya	Kearifan Lokal (Sandang, Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan
Bentuk Bantuan	Maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro	Paling banyak diberikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro	Paling banyak diberikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro
	Maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Karya Kreatif Inovatif	Paling banyak diberikan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Penciptaan Karya Kreatif Inovatif	Paling banyak diberikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pendayagunaan Ruang Publik
	Maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Pendayagunaan Ruang Publik	Paling banyak diberikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pendayagunaan Ruang Publik	
		Khusus penerima Perseorangan, untuk ketiga kategori kegiatan, paling banyak diberikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	
Jumlah Penerima	45 penerima bidang Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro	18 penerima bidang Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro	
	81 penerima bidang Penciptaan Karya Kreatif Inovatif	30 penerima bidang Penciptaan Karya Kreatif Inovatif	
	63 Penerima bidang Pendayagunaan Ruang Publik	85 Penerima bidang Pendayagunaan Ruang Publik	

Sumber: Petunjuk Teknis FBK (<https://fbk.id/>)

*Tahun 2022 sedang dalam masa pembukaan pendaftaran yaitu 14 Februari-14 Maret 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa tema, bentuk bantuan yang diberikan dan jumlah penerima bantuan berbeda setiap tahunnya. Bantuan FBK diberikan kepada 3 (tiga) kegiatan yaitu: (1) dokumentasi karya/pengetahuan maestro, (2) penciptaan karya kreatif inovatif, dan (3) pendayagunaan ruang publik. Bantuan ini diberikan kepada seluruh pelaku budaya yang telah mendaftar proposal, telah dinilai dan terpilih oleh anggota komite seleksi. Namun, pada tahun 2022 bantuan FBK diprioritaskan kepada pelaku budaya yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan budaya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), pelaku budaya yang berada di provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di bawah rata-rata nasional tahun 2020, penyandang disabilitas, perempuan dan partisipasi aktif kelompok lansia.

Kehadiran FBK menjadi pemicu dan ruang belajar bagi para pelaku budaya dalam memperbaiki lembaga kesenian/budaya yang dikelola melalui pendampingan dari komite seleksi dan lokakarya yang akan diadakan oleh panitia. FBK juga diharapkan menjadi jawaban dari permasalahan pengembangan budaya selama ini. Hasil penelitian Koalisi Seni Indonesia (2016), mencatat bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku budaya dalam mengembangkan kebudayaan antara lain yaitu kesenian belum dinilai sebagai bidang yang penting, akuntabilitas lembaga seni baik dalam tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan masih dipertanyakan serta minimnya dukungan pemerintah. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kemendikbud Ristek mendata terdapat sebesar 226.586 seniman dan pekerja kreatif di 34 provinsi yang terdampak pandemi Covid-19 (Kompas.id, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa FBK juga menunjukkan kehadiran negara dalam upaya melestarikan kebudayaan dan membantu pelaku budaya khususnya pada masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan transparansi dan evaluasi yang berkala dalam pelaksanaan program FBK. Serta, memastikan bahwa pelaku budaya yang menerima FBK pada tahun 2022 sesuai dengan target yang telah diprioritaskan.